

**PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
STUDI KASUS PADA  
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

**Handaru Purnandika**

**NIM: 002114136**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2005**

**SKRIPSI**

**Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
STUDI KASUS PADA  
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

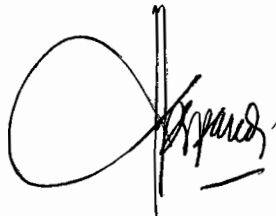
**Oleh :**

**Handaru Purnandika**

**NIM : 002114136**

**Telah disetujui oleh :**

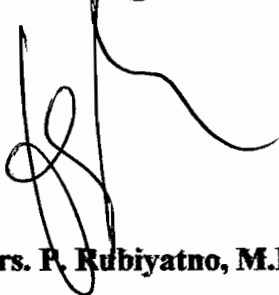
**Pembimbing I**



**Drs. YP. Supardiyono, M.Si, Akt.**

**Tanggal : 19 Februari 2005**

**Pembimbing II**



**Drs. P. Rubiyatno, M.M.**

**Tanggal : 2 Maret 2005**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
STUDI KASUS PADA  
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Dipersiapkan dan ditulis oleh :**

**Handaru Purnandika**


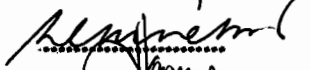


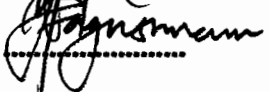
**NIM : 002114 136**

**Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji**

**Pada tanggal 18 Maret 2005**

**dan dinyatakan memenuhi syarat**

**Susunan Panitia Penguji**

	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua</b>	<b>: Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt.</b>	
<b>Sekretaris</b>	<b>: Fr. Reni Retno Angraeni, SE., M.Si., Akt.</b>	
<b>Anggota</b>	<b>: Drs. YP. Supardiyone, M.Si., Akt.</b>	
<b>Anggota</b>	<b>: Drs. P. Rubiyatno, M.M.</b>	
<b>Anggota</b>	<b>: Dra. YF. Gien Agustina Warsari, MM., Akt.</b>	

**Yogyakarta, 31 Maret 2005**

**Fakultas Ekonomi**

**Universitas Sanata Dharma**



  
**Alex Kahu Lantum, M.S**

## **HALAMAN MOTO dan PERSEMBAHAN**

Aku sangat percaya kalau dunia ini adalah panggung sandiwara,

dimana kita adalah lakon-lakon yang harus memainkan peran.

Dan aku sangat percaya, ketika kita dapat memainkan lebih dari satu peran,

maka kita akan lebih banyak bisa berharap akan keberhasilan.

Hasil karyaku ini aku persembahkan kepada TUHAN  
dan hamba-hambanya yang telah membantuku  
dalam melalui perjalanan hidupku hingga saat ini.



Terimakasih TUHAN, telah Kau izinkan aku menyuarakan  
hatiku, karena tanpa  
Izin-Mu niscaya suara hati hamba dapat terungkap  
disini.

#### SUARA HATI HAMBA

hidup semakin lama semakin terasa hampa,  
yah... itu sangat kurasa dalam setiap detik detak  
jantungku,  
yang menembus raga,  
untuk terus tenggelam dalam gemerlap imajinasi sisi  
manusiawiku.

dimanakah Engkau Tuhan?

tak pernah kurasa kehadiran-Mu dikala aku ingin  
menghamba.

benarkah kebarat harus kusujudkan hatiku,  
atau ke kiblat?

begitu agung firman-firmanMu terlanjur  
hamba-hambaMu,  
hingga batinkupun seperti pengemis, bukannya ingin  
mengarahkan telapak tangannya.

Mgl, 12

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan atau daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 18 Maret 2005

Penulis



**Handaru Purnandika**

## **ABSTRAK**

### **Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Handaru Purnandika**  
**002114136**  
**Universitas Sanata Dharma**  
**2005**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus. Data yang dicari dalam penelitian ini adalah gambaran umum, realisasi pajak kendaraan bermotor periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003, dan realisasi pendapatan asli daerah periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Teknis pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam mengolah data yang telah diperoleh digunakan teknik analisis regresi sederhana.

Kesimpulan yang diperoleh dari analisis data adalah Pajak Kendaraan Bermotor periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003.

## **ABSTRACT**

### **The Influence of Motor Vehicles Tax on the Regional Original Revenue Case Study to the Special Area of Yogyakarta Government**

**Handaru Purnandika  
002114136  
Sanata Dharma University  
2005**

The study aimed to find out the influence of Motor Vehicle Tax in the period of 1998 until 2003 on the Regional Original Revenue in the period of 1998 until 2003. The kind of research used by the researcher was case study. The data needed in this study were the general description, realization of motor vehicle tax in the period of 1998 until 2003, and the realization of regional original revenue in the period of 1998 until 2003. The techniques of data collecting used were interview and documentation. The simple regression analysis was used in order to analyze the collected data.

The conclusion that was achieved from the data analysis was that motor vehicle Tax in the period of 1998 until 2003 had significant influence to on the Regional Original Revenue of the Special Area of Yogyakarta Government in the period of 1998 until 2003.



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya dari awal hingga terselesaikannya penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah”** dengan pendekatan studi kasus. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penulis dengan kerendahan hati dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, masukan, semangat dan saran kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Drs. P. Rubiyatno, M.M. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, masukan, semangat dan saran kepada penulis dalam menulis skripsi ini.

4. Bapak E. Maryarsanto P, S.E, Akt. sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, masukan, semangat dan saran kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama belajar di Universitas Sanata Dharma.
6. Bapak Setiawan, Bapak Widiyanto, dan Bapak Bejo yang telah menyediakan data-data yang saya butuhkan dalam penelitian.
7. Ayahku di alam kelanggengan yang telah memberiku sedikit pandangan hidup ketika masih sealam denganku. Bundaku yang selalu memenuhi kebutuhan kasih sayang dan finansial untuk membayar kuliah, tapi selalu menganggap aku sebagai anak kecil. Kakak-kakakku (Galuh, Yeni, Imam), sekarang kita belum sejalan, tapi aku tahu arah kita sama. Aku akan buktikan itu. Mas Andi yang selalu mendukungku disegala arah. Almarhum kakakku (Sulis) semoga Tuhan memberikan kebahagiaan di alammu sekarang.
8. Sahabat-sahabatku: Uwik, kang Wahyu, Gendeng dan Rembol. Kita berkembang bersama-sama tapi dewasa sendiri-sendiri.
9. Buat pompom girls (Endah Sweety, Upik Q-tee, dan Kak Rofi Ndut), kalau aku lulus kita makan-makan ya?
10. Anak-anak kontrakanku: Si-Tom, Adok, Mitsu, Nyenyeng, Keye, Si-Budi Kecil, Ika Cute Tea, Chutile manies, Itonk, B-bah dan Lesmono, kalian harus rajin belejar, supaya cepat lulus.
11. Anak-anak komunitas Browie 3: Pepenk, Agek, Celenk, Crepo, Bebek, Achonk, Pikacu, Dono, Gocenk, Sigit, Junjung, Uun Bluun, Kriting, Wa2n,

Kimi, Rica, Beti Agung, Jampes, Didik, Caboel, Yunus. terimakasih telah berproses bersama kalian.

12. Buat Diyan, terimakasih sudah ngipasin kepalaku saat kepanasan.
13. Dua sejoli Anton dan Ririn, kalian baik banget saudaraku, banyak bantuan yang kalian berikan dalam skripsiku ini.
14. Simbah sicalon sastrawan, aku tunggu karyamu bos.
15. Teman baruku Satya, belajar yang rajin!
16. Anak-anak akuntansi B 00, anak-anak MPTku.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, terima kasih atas semua dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 18 Maret 2005

Penulis



Handaru Purnandika

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan .....	5



## BAB II LANDASAN TEORI

A. Pendapatan daerah .....	7
1. Pengertian Pendapatan Daerah .....	7
2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah	
Menurut Undang-Undang No.25 Tahun1999.....	7
B. Pendapatan Asli Daerah	
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	7
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	7
C. Dana Perimbangan.....	8
D. Pajak.....	8
1. Definisi Pajak.....	8
2. Unsur-Unsur Pajak.....	9
3. Pengelompokan Pajak.....	9
4. Fungsi Pajak.....	11
5. Syarat Pemungutan Pajak .....	11
6. Teori Pendukung Pemungutan Pajak.....	12
7. Hukum Pajak.....	13
8. Stelsel Pajak.....	14
9. Asas Pemungutan Pajak.....	15
10. Sistem Pemungutan Pajak.....	16
11. Hambatan Pemungutan Pajak .....	16
12. Tarif Pajak.....	17
13. Hapusnya Utang Pajak.....	18

E. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	19
1. Pengertian Kendaraan Bermotor.....	19
2. Pengertian Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor .....	19
3. Jenis Pajak Yang Dapat dikenakan Terhadap Kendaraan Bermotor .....	20
4. Dasar Hukum .....	20
5. Teori Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	21
6. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	21
7. Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	21
8. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	22
9. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	22
10. Masa Pajak Kendaraan bermotor.....	23
11. Saat Pajak kendaraan bermotor Terutang.....	23
12. Pengecualian Dan Pembebasan .....	24
D. Hipotesis .....	25

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	26
D. Data Yang Dicari .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data .....	28

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM**

<b>A. Sejarah Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.....</b>	<b>33</b>
<b>B. Geografi .....</b>	<b>35</b>
<b>C. Kekayaan Alam.....</b>	<b>36</b>
<b>D. Nilai-Nilai Budaya.....</b>	<b>38</b>
<b>E. Ekonomi.....</b>	<b>39</b>
<b>F. Politik.....</b>	<b>42</b>
<b>G. Pendapatan Asli Daerah.....</b>	<b>45</b>

#### **BAB V DISKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

<b>A. Diskripsi Data .....</b>	<b>47</b>
<b>B. Analisis Data.....</b>	<b>49</b>
<b>C. Pembahasan .....</b>	<b>51</b>

#### **BAB VI PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>54</b>
<b>B. Keterbatasan Penelitian.....</b>	<b>54</b>
<b>C. Saran .....</b>	<b>55</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>57</b>
-----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel V. 1	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 1998 s/d 2003 .....	48
Tabel V. 2	Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 1998 s/d 2003 ...	49
Tabel V. 3	Descriptive Statistics.....	49
Tabel V. 4	Correlations.....	50
Tabel V. 5	Model Summary .....	50
Tabel V. 6	Coefficients.....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	
	Tahun Anggaran 1998 s/d 1999.....	57
Lampiran 2	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	
	Tahun Anggaran 1999 s/d 2000.....	58
Lampiran 3	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	
	Tahun Anggaran 2000 .....	59
Lampiran 4	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	
	Tahun Anggaran 2001 .....	60
Lampiran 5	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	
	Tahun Anggaran 2002 .....	61
Lampiran 6	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	
	Tahun Anggaran 2003 .....	62
Lampiran 7	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	
	Tahun Anggaran 1998 s/d 1999.....	63
Lampiran 8	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	
	Tahun Anggaran 1999 s/d 2000.....	64
Lampiran 9	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	
	Tahun Anggaran 2000 .....	65
Lampiran 10	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	
	Tahun Anggaran 2001 .....	66

<b>Lampiran 11 Realisasi Pendapatan Asli Daerah</b>	
<b>Tahun Anggaran 2002 .....</b>	<b>67</b>
<b>Lampiran 12 Realisasi Pendapatan Asli Daerah</b>	
<b>Tahun Anggaran 2003 .....</b>	<b>68</b>
<b>Lampiran 13 Regression.....</b>	<b>69</b>
<b>Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah</b>	
<b>Propinsi DIY .....</b>	<b>71</b>
<b>Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat</b>	
<b>DPRD Propinsi DIY .....</b>	<b>72</b>
<b>Surat Ijin Penelitian .....</b>	<b>73</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu fungsi dari pemerintahan, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah adalah sebagai lembaga ekonomi, seperti lembaga keuangan lainnya. Pemerintah daerah sebagai lembaga ekonomi akan melakukan berbagai bentuk pengeluaran untuk membiayai semua kegiatan yang dilakukan, dan sebaliknya pemerintah daerah akan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh pendapatan guna menutupi pengeluaran. Hal tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu pemerintah daerah tingkat propinsi di Indonesia.

Sumber pendapatan pemerintah daerah jika diartikan secara luas adalah sumber pendapatan yang meliputi tidak saja pendapatan asli daerah, akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya (Samudra, 1995:50). Sedang sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengertian dalam arti sempit. Jadi jelas berbeda dengan pengertian sumber Pendapatan Daerah (secara global). Sebab, dari semua sumber-sumber pendapatan, hanya sebagian saja yang merupakan Pendapatan Asli Daerah. Beberapa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil dari

perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah (Samudra, 1995:51).

Khusus mengenai Pajak Daerah, Ruang lingkungnya terbatas pada objek pajak yang belum dikenakan oleh negara (Mardiasmo, 2001:93). Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penetapan pajak daerah, yaitu: Tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, sederhana, jenisnya tidak terlalu banyak, lapangan pajaknya tidak meliputi / mencampuri pajak pusat, berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut, biaya administrasinya rendah, beban pajak relatif seimbang, dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional (Samudra, 1995:52). Pajak daerah dapat dikelompokkan menjadi dua macam, sesuai dengan pembagian administrasi daerah, yaitu Pajak Daerah Propinsi dan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota. Pendapatan yang diperoleh dari Pajak Daerah digunakan untuk meningkatkan kemajuan daerah masing-masing, dan tidak diserahkan kepada pemerintah pusat.

Pajak Daerah yang menjadi hak bagi Pemerintah Daerah Propinsi salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap kendaraan yang diperuntukkan guna semata-mata digerakkan atau juga diturutkan oleh suatu kekuatan mekanik yang ada di atau pada kendaraan itu, termasuk pula kereta-kereta tambahan dari kendaraan tersebut, dalam hal ini termasuk kendaraan bermotor yang berjalan diatas rel (Samudra, 1995:149).

Pertama kali jenis pajak untuk kendaraan bermotor lahir adalah saat diadakannya Pajak Rumah Tangga 1908. Ada empat dasar pengenaan pajak dari Pajak Rumah Tangga, dua diantaranya adalah mengenai jumlah dan macam sepeda motor serta jumlah dan macam mobil. Akan tetapi sejak Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 diundangkan, maka hampir semua objek atas kendaraan bermotor yang ada, diambil alih oleh Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor (Samudra, 1995:147).

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap yang dikenal dengan sebutan SAMSAT. Pembayaran oleh wajib Pajak kendaraan Bermotor ini dilakukan ke Kantor Cabang Kas Daerah di SAMSAT, dimana pada umumnya kantor cabang ini berada di setiap Daerah Kabupaten dan Kota diseluruh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistem pengelolaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini sepenuhnya dilakukan di setiap Kantor Cabang Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melihat pada uraian di atas, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didapat dari beberapa sumber. Masing-masing sumber pendapatan tersebut tentunya akan memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik itu pengaruh yang signifikan maupun pengaruh yang tidak signifikan. Berdasar pada kenyataan tersebut, peneliti akan melakukan suatu pengujian pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah: Apakah ada pengaruh yang signifikan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Batasan Masalah**

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah sendiri dibagi lagi menjadi dua yaitu Pajak tingkat Propinsi dan Pajak tingkat Kabupaten / Kota. Ada beberapa macam komponen pajak yang menjadi hak pemerintah daerah tingkat Propinsi yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Karena keterbatasan waktu maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan hanya pada Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan literatur perpajakan, yang diharapkan bisa berguna bagi penelitian selanjutnya, yang khususnya meneliti tentang hubungan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah.

2. Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan tentang Pendapatan Asli Daerah dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

##### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **Bab II. Landasan Teori**

Bab ini berisi uraian teoritis dari hasil studi pustaka. Uraian ini akan digunakan sebagai landasan berpijak dalam mengolah data.

##### **Bab III. Metodologi Penelitian**

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**Bab IV. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Bab ini akan menguraikan mengenai sejarah pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, geografi, kekayaan alam, nilai-nilai budaya, ekonomi dan politik.

**Bab V. Deskripsi Data, Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi data, analisis data dan pembahasan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah.

**Bab VI. Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan hasil pembahasan, keterbatasan penelitian dan saran-saran bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pendapatan Daerah**

##### **1. Pengertian Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dan pendapatan dari Pemerintah Pusat yang dapat berupa penerimaan pajak maupun subsidi.

##### **2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1999**

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain Penerimaan yang sah

#### **B. Pendapatan Asli Daerah**

##### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah Adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

- a. Hasi Pajak Daerah,

- b. Hasil Retribusi Daerah,
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Lainnya Yang Dipisahkan,
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

### **C. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan terdiri dari tiga jenis sumber dana dan merupakan sumber pembiayaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, yaitu:

1. Bagian Daerah Dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan Dari Sumber Daya Alam,
2. Dana Alokasi Umum,
3. Dana Alokasi Khusus.

### **D. Pajak**

#### **1. Definisi Pajak**

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, dan berkenaan dengan hal ini akan dikemukakan tiga definisi (Zain, 2003:10-11), yaitu:

Tentang pajak, Adriani mendefinisikan sebagai berikut:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

membayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro juga memberi definisi tentang pajak, yaitu:

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksi yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Definisi lain yang dikemukakan oleh Sommerfeld, Anderson, & Brock adalah sebagai berikut:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya.

## 2. Unsur-Unsur Pajak

Dari definisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rohmat Soemitro, SH dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur (Mardiasmo, 2003:1), yaitu:

### a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

### b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 3. Pengelompokan Pajak

Untuk mempermudah dalam pengklasifikasian, pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

#### a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau di tanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (Resmi, 2002:6-8).
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga (Resmi, 2002:6-8).

#### b. Menurut sifatnya

- 1) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul (Tjahjono & Husein, 1999:9).

2) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia atau tidak (Tjahjono & Husein, 1999:9-10).

c. Menurut lembaga pemungutnya

1) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya (Resmi, 2002:6-8).

2) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Resmi, 2002:6-8).

#### 4. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2003:1), yaitu :

a. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulated*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

**5. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2003:2):

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

b. Pemungutan pajak harus berdasar undang-undang (Syarat *Yuridis*)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus *efisien* (Syarat *Finansial*)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. **Sistem pemungutan pajak harus sederhana**

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**6. Teori Pendukung Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa teori yang memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2003:3-4), antara lain:

a. **Teori Asuransi**

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. **Teori Kepentingan**

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. **Teori Daya Pikul**

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

d. **Teori Bakti**

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus

selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

**7. Hukum Pajak**

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*ficus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak (Waluyo & Ilyas, 1999:6). Apabila memperhatikan materinya, Hukum Pajak dibedakan menjadi:

a. Hukum Pajak *Materiil*

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak (Waluyo & Ilyas, 1999:6).

b. Hukum Pajak *Formal*

Hukum pajak formal adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum pajak materiil tersebut menjadi kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap



penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya (Resmi, 2002:4-5).

#### **8. Stelsel Pajak**

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel (Mardiasmo, 2003:6-7), yaitu:

a. *Stelsel nyata (riël stelsel).*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. *Stelsel anggapan (fictieve stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

c. *Stelsel campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

#### **9. Asas Pemungutan Pajak**

Ada beberapa asas yang mendasari pemungutan pajak (Mardiasmo, 2003:7), antara lain:

a. *Asas domisili (asas tempat tinggal)*

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

d. Asas *yuridis*

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada Negara atau warganya. Oleh karena itu pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 (Waluyo & Ilyas, 1999:5).

e. Asas *ekonomis*

Negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk ini pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu (Waluyo & Ilyas, 1999:6).

#### 10. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam hal pemberian wewenang kepada siapa yang berhak menentukan besarnya pajak yang terutang, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga (Mardiasmo, 2003:7-8), yaitu:

a. *Official Assessment.*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System.*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holiday System.*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiskus* dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 11. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi (Mardiasmo, 2003:8-9):

a. Perlawanan *pasif*

Masyarakat enggan (*pasif*) membayar pajak, yang dapat disebabkan karena:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. *Perlawanan Aktif*

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada *fiskus* dengan tujuan untuk menghindari pajak.

## 12. Tarif Pajak

Dalam menghitung seberapa besar pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak, ada empat macam tarif yang digunakan (Mardiasmo, 2003:9-10):

a. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

b. Tarif sebanding/*proporsional*

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

c. Tarif *progresif*

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif *degresif*

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## 13. Hapusnya Utang Pajak

Ada lima hal yang dapat menghapus utang pajak (Waluyo & Ilyas, 1999:10), yaitu:

a. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara.

b. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya.

c. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan.

Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih kembali. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain, apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa.

d. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sangsi administrasi.

e. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya keadaan keuangan wajib pajak.

## **E. Pajak Kendaraan Bermotor**

### **1. Pengertian Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor (KBM) adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak KBM yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak.

### **2. Pengertian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data objek dan subjek, sampai kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak serta penyetorannya.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

### **3. Jenis Pajak yang Dapat Dikenakan terhadap Kendaraan Bermotor**

Ada beberapa jenis pajak yang dapat dikenakan terhadap kendaraan bermotor (Samudra, 1995:144-145), antara lain:

a. *Motor Fuels Tax/MFT* (pajak minyak atas kendaraan bermotor).

- b. *Motor Vehicle License Tax/MVLT* (pajak lisensi atas kendaraan bermotor)
- c. *License Tax/DLT* (pajak atas surat izin mengemudi).
- d. *Motor Vehicle Purcase Tax/MVPT* (pajak pembelian atas kendaraan bermotor).

#### **4. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Terutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah,
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2002,
- d. Surat Keputusan Bersama KAPOLRI, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otda dan Dirut PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 937-1228, Nomor SKEP/02/X/1999 yang mengatur tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT).

#### **5. Teori Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

- a. *Gross Weight/Net Weight* (berat kotor atau berat bersih kendaraan bermotor).
- b. *Horse Power* (kekuatan mesin).
- c. *Ownership* (pemilikan).
- d. *Seat Capacity* (kapasitas tempat duduk).

e. *Type* (jenis kendaraan).

#### **6. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934, pajak terutang oleh orang yang memegang kendaraan bermotor. Kepala keluarga dianggap sebagai pemegang kendaraan bermotor kepunyaan anggota keluarganya. Jika sebuah kendaraan bermotor bersamaan dipegang oleh lebih dari satu orang, maka pejabat yang ditunjuk menentukan siapa yang akan dianggap sebagai pemegang (Samudra, 1995:150).

#### **7. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934, telah merinci objek pajak kendaraan bermotor secara jelas. Objek pajak yang dimaksud adalah (Samudra, 1995:148-149):

- a. Kendaraan bermotor: yang digerakkan oleh motor, yang dihidupkan dengan generator, gas, arang, atau oleh motor yang memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin, terlepas dari hal apakah motor itu khusus atau tidak khusus diperuntukkan menggunakan minyak tanah atau dengan campuran minyak tanah dan bensin.
- b. Segala kendaraan bermotor lainnya yang tidak digerakkan oleh motor yang semata-mata memakai bensin sebagai bahan bakar.
- c. Kendaraan bermotor, yang digerakkan oleh motor, dengan semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar, yang mempunyai berat total yang diizinkan 3.500kg atau lebih.



- d. Kereta tambahan (kereta gandengan) dari kendaraan bermotor (*wagon trailers*).
- e. Kendaraan bermotor seperti yang dimaksudkan pada nomor 3, yang mempunyai berat total yang diperkenankan kurang dari 3.500kg, kecuali yang telah dikenakan Pajak Rumah Tangga berdasarkan Pasal 11 ayat (4) dan (6).

#### **8. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar Pengenaan Tarif = Nilai Jual KBM X Bobot.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum. Bobot mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor (Samudra, 1995:151).

#### **9. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif Pajak Kendaraan bermotor dibagi menjadi 3 (Samudra, 1995:152-154), yaitu:

- a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 1% untuk kendaraan bermotor umum.
- c. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

#### **10. Masa Pajak Kendaraan Bermotor**

Masa Pajak Kendaraan Bermotor adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran Kendaraan Bermotor (Samudra, 1995:156).

### **11. Saat Pajak Kendaraan Bermotor Terutang**

Pajak Kendaraan Bermotor terutang sejak tidak dibayarnya Pajak Kendaraan Bermotor (Samudra, 1995:156).

### **12. Pengecualian dan Pembebasan**

Menurut Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934, pajak tidak dipungut terhadap kendaraan sebagai berikut (Samudra, 1995:155):

- a. Kendaraan bermotor milik Negara atau daerah, yang hanya digunakan untuk dinas umum,
- b. Kendaraan bermotor yang menurut peraturan ordonansi lalulintas diizinkan berjalan dengan nomor percobaan,
- c. Kendaraan bermotor yang menurut sifatnya hanya digunakan untuk pembikinan dan pemeliharaan jalan-jalan,
- d. Pemadam kebakaran,
- e. Kendaraan bermotor para konsul dan wakil Negara asing,
- f. Kendaraan bermotor turis yang tidak lebih lama dari 90 hari.

## **F. Hipotesis**

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah. Sebagai salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor tentunya memberikan suatu pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, baik itu pengaruh yang signifikan maupun yang tidak signifikan. Bentuk dari pengaruh tersebut adalah jika Pajak Kendaraan Bermotor meningkat maka akan menyebabkan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah, dan sebaliknya jika Pajak Kendaraan Bermotor turun maka akan menyebabkan penurunan pada Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang peneliti rumuskan adalah:

**H<sub>0</sub> : Ada pengaruh yang tidak signifikan dari Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.**

**H<sub>1</sub> : Ada pengaruh yang signifikan dari Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.**



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus, yaitu penelitian terhadap objek tertentu, dimana data yang telah diperoleh akan diolah dan dianalisa, selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

##### **B. Tempat dan Waktu Penelitian.**

1. Tempat penelitian dilakukan di PEMDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 16 Desember 2004 sampai dengan 16 Maret 2005.

##### **C. Subjek dan Objek Penelitian.**

###### **1. Subjek Penelitian.**

Subjek penelitian adalah PEMDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

###### **2. Objek Penelitian.**

Objek penelitian adalah realisasi Pajak Kendaraan Bermotor periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003, serta data realisasi Pendapatan Asli Daerah periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003.

#### **D. Data yang Dicari**

1. Gambaran umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003.
3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai gambaran umum propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data atau catatan tertulis yang relevan dan akurat. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah.

## F. Teknik Analisis Data.

Untuk menjawab permasalahan, penulis menggunakan analisis regresi sederhana, hal ini karena penulis akan melakukan suatu peramalan, dimana dalam peramalan tersebut melibatkan dua variabel, yaitu variabel independen (Pajak Kendaraan Bermotor) dan variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah), variabel dependen disini diduga berdasarkan satu variabel independent. Dalam analisis regresi tersebut, hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen merupakan hubungan yang linier, dan hubungan ini merupakan hubungan statistikal, artinya tidak ada nilai variabel dependen yang pasti untuk setiap nilai variabel independen yang diketahui.

Ada beberapa asumsi yang mendasari analisis regresi linier sederhana diatas, yaitu:

1. Variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan linier.

Persamaan liniearnya dinyatakan dengan :  $Y_i = \alpha + \beta X_i + e_i$

Dimana :  $Y_i$  = Nilai variabel dependen dalam observasi atau percobaan ke- $i$ .

$\alpha$  = Parameter pertama dari persamaan regresi yang menunjukkan nilai  $Y$  apabila  $X = 0$ .

$\beta$  = Parameter kedua dari persamaan regresi yang menunjukkan slope dari garis regresi

$X_i$  = Nilai variabel independen dalam observasi atau percobaan ke- $i$ .

$e_i$  = Random error dalam observasi atau percobaan ke- $i$ ,  
berkaitan dengan proses sampling.

2. Variabel dependen adalah merupakan variabel random kontinyu, sedangkan variabel independennya merupakan serangkaian nilai yang ditentukan atau diketahui dan bukan random. Variabel independen  $X$  merupakan variabel yang nilainya sudah dirancang (dalam eksperimen), sedang variabel dependen  $Y$  nilainya diperoleh melalui proses sampling. Nilai  $e$  merupakan sampling error yang berhubungan dengan variabel random dependen.
3. Distribusi kondisional variabel dependen, untuk berbagai nilai variabel independen tertentu, semua berdistribusi normal. Dalam model regresi linear, asumsi ini menunjukkan bahwa distribusi sampling error  $e$  juga normal.
4. Varian dari distribusi kondisional variabel dependen, untuk berbagai nilai variabel independen tertentu, semuanya sama atau homogen. Ini berarti bahwa variance yang berkaitan dengan sampling error  $e_i$  adalah sama untuk berbagai nilai  $X_i$ . Asumsi ini dinamakan *homoscedasticity*.
5. Nilai observasi yang satu dengan yang lain dari variabel random, tidak berkorelasi (*uncorrelated*). Asumsi ini juga menunjukkan bahwa jumlah random error  $e_i$  juga tidak berkorelasi.

Parameter  $\alpha$  dan  $\beta$  dalam model regresi seperti pada asumsi pertama, diduga dengan nilai  $a$  dan  $b$  yang dihitung dari data sampel. Persamaan regresi linear untuk menduga nilai variabel dependen ( $Y$ ) (Pendapatan Asli Daerah)

berdasarkan nilai variabel independen (X) (Pajak Kendaraan Bermotor) tertentu, dinyatakan dengan:  $Y = a + bX$

Peneliti menggunakan *SPSS for Windows* dalam mengolah data, dan hasilnya adalah:

#### 1. *Descriptive Statistics*

Pada bagian ini diperlihatkan deskripsi dari kedua variabel yang diregresikan. Yakni variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) dengan X (Pajak Kendaraan Bermotor). Isi deskripsi tersebut adalah: rata-rata (mean), standar deviasi dan jumlah kasus (N).

#### 2. *Correlation*

Pada bagian dua ini, ditunjukkan hasil koefisien korelasi, sebab pada dasarnya dalam melakukan uji regresi perlu dicek terlebih dahulu tingkat korelasinya.

#### 3. *Model Summary*

Prosentase sumbangan yang diberikan oleh X (Pajak Kendaraan Bermotor) terhadap Y (Pendapatan Asli Daerah) ditampilkan dalam output ini.

#### 4. *Cooficiens*

Didalam uji ini dikemukakan nilai koefisien a dan b serta harga t-hitung serta tingkat signifikansi. Nilai t merupakan nilai yang berguna untuk pengujian, apakah pengaruh X (Pajak Kendaraan Bermotor) terhadap Y (Pendapatan Asli Daerah) benar-benar signifikan atau tidak. Pengujian juga bisa dilakukan menggunakan nilai signifikansi yang dibandingkan dengan  $\alpha$ .



Proses pengujiannya adalah:

a. Hipotesis:

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah. Sebagai salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor tentunya memberikan suatu pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, baik itu pengaruh yang signifikan maupun yang tidak signifikan. Bentuk dari pengaruh tersebut adalah jika Pajak Kendaraan Bermotor meningkat maka akan menyebabkan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah, dan sebaliknya jika Pajak Kendaraan Bermotor turun maka akan menyebabkan penurunan pada Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang peneliti rumuskan adalah:

$H_0$  : Ada pengaruh yang tidak signifikan dari Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_1$  : Ada pengaruh yang signifikan dari Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Ketentuan:

Untuk menguji apakah  $H_0$  diterima atau ditolak maka dilakukan uji signifikansi dengan  $\alpha = 0,050$ , yang artinya kemungkinan peneliti salah dalam menolak  $H_0$  sebesar 5%.

$H_0$ : Ditolak, jika probabilitas  $< \alpha 0,05$ .

$H_0$ : Diterima, jika probabilitas  $> \alpha 0,05$ .

c. Kesimpulan:

Dalam kesimpulan ini peneliti melakukan perbandingan antara probabilitas (signifikansi) hasil analisis dengan  $\alpha$  0,050. Jika hasil perbandingan menunjukkan probabilitas kurang dari 0,050 maka  $H_0$  ditolak, dan kesimpulannya adalah ada pengaruh yang signifikan dari Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika hasil perbandingan menunjukkan bahwa probabilitas lebih dari 0,050, maka  $H_0$  diterima, dan kesimpulannya adalah ada pengaruh yang tidak signifikan dari Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**BAB IV**  
**GAMBARAN UMUM**  
**PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**A. Sejarah Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi terbentuk pada tanggal 4 Maret 1950, yaitu melalui UU No. 3 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959. Akan tetapi kehadiran daerah ini sebagai daerah istimewa sudah ditetapkan dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, dengan satu piagam penetapan yang ditandatangani Presiden Soekarno, Sultan Hamengku Buwono IX serta Paku Alam VIII pada tanggal 19 Agustus 1945.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Yogyakarta merupakan dua buah kerajaan yang masing-masing dikenal sebagai Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Kadipaten Paku Alaman dengan rajanya Paku Alam VIII. Namun Ketika berita proklamasi diterima di Yogyakarta, kedua pimpinan Yogyakarta tersebut mengadakan pertemuan untuk menentukan sikap yang akan diambil. Setelah mengadakan konsolidasi dengan lebih kurang 100 orang tokoh pemuda yang terdiri dari berbagai golongan pada tanggal 19 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945 secara sendiri-sendiri kembali mengeluarkan pernyataan yang pada

dasarnya menekankan bahwa kedua kerajaan yang mereka pimpin menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia yaitu sebagai daerah istimewa. Dalam pernyataan tersebut, kedua pimpinan itu juga menyebutkan bahwa mereka masing-masing tetap menjadi pemegang kekuasaan terhadap daerahnya dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Istimewa Yogyakarta pada awal September 1945 dibentuk, hal ini dilakukan untuk menyikapi pernyataan kedua pimpinan Yogyakarta sesuai dengan instruksi dari Jakarta. Setelah badan pekerja KNI ini terbentuk pada tanggal 30 Oktober 1945 Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan amanat bersama yang isinya antara lain berbunyi yaitu supaya jalannya pemerintahan di daerah kami berdua selaras dengan dasar-dasar UUD 1945 Negara Republik Indonesia, maka badan pekerja ini merupakan suatu badan legislatif yang dapat dianggap sebagai wakil rakyat daerah kami berdua yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Amanat yang di keluarkan kedua pimpinan Yogyakarta tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyatukan diri dalam sistem Negara Republik Indonesia dan juga sekaligus telah mengakhiri dualisme kepemimpinan. Maka atas dasar sikap tersebut keberadaan kesultanan dan kadipaten Paku Alaman telah tiada, karena keduanya telah menjadi satu propinsi, yaitu Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Geografi**

### **1. Geografi**

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu dari 27 propinsi di wilayah Indonesia. Propinsi ini terletak di pulau Jawa bagian tengah sebelah selatan, pada posisi  $7^{\circ}. 33'$  -  $8^{\circ}. 12'$  lintang selatan dan  $110^{\circ}$  -  $110^{\circ}. 50'$  bujur timur.

### **2. Batas Wilayah**

Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi laut Indonesia, sedang dibagian timur laut, barat laut dan bagian barat dibatasi oleh wilayah propinsi Jawa Tengah yang meliputi :

- a. Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara
- b. Kabupaten Klaten di bagian timur laut
- c. Kabupaten Magelang di bagian barat laut
- d. Kabupaten Purworejo di bagian barat

### **3. Luas Wilayah**

Luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan propinsi terkecil setelah DKI Jakarta, yaitu seluas  $3.185,80 \text{ km}^2$ , dimana secara administratif dibagi dalam 5 daerah kabupaten dan kota yang dirinci sebagai berikut :

- a. Kabupaten Kulon Progo seluas  $586,27 \text{ km}^2$
- b. Kabupaten Bantul seluas  $506,85 \text{ km}^2$
- c. Kabupaten Gunung Kidul seluas  $1.485,36 \text{ km}^2$
- d. Kabupaten Sleman seluas  $574,82 \text{ km}^2$

e. Kota Madya Yogyakarta seluas 32,50 km<sup>2</sup>

### C. Kekayaan Alam

Potensi sumber daya alam yang dimiliki propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta relatif terbatas baik tanah, air, maupun kandungan mineral yang tersimpan didalam perut bumi. Kendati demikian beranjak dari potensi alam yang terbatas tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta telah mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Kekayaan alam tersebut diantaranya adalah :

#### 1. Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah jenis tanah *alluvial*, *litosol*, *regosol*, *rensina*, *grumosol*, *meditran* dan *latosol*. Tanah tersebut digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan, pekarangan/pembangunan dan lain-lain.. Untuk penguasaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta dikategorikan menjadi dua, yaitu tanah yang dikuasai oleh masyarakat dan tanah yang dikuasai oleh Negara. Selain lahan yang dimanfaatkan, masih terdapat 37.053,22 ha yang merupakan kawasan hutan Negara. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat adalah tanah yang telah diwarisi secara turun temurun, yang pada umumnya telah dimanfaatkan untuk lahan pemukiman, pertanian dan perkebunan. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Negara adalah tanah kawasan hutan yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, hutan konversi dan tanah-

tanah kepentingan umum, seperti tanah untuk saluran irigasi, jalan, lapangan olah raga, kuburan dan lain-lain.

## 2. Air

Kondisi sumber daya air di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi air hujan, air permukaan dan air tanah. Air permukaan dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan keperluan domestik. Sedangkan air tanah dimanfaatkan untuk rumah tangga, perkantoran, perhotelan, industri berat dan sebagainya.

Menurut penelitian cadangan air permukaan volumenya mencapai 2.333.576,696 m<sup>3</sup> dan telah dimanfaatkan sebesar 1.645.033,407 m<sup>3</sup>. dan untuk cadangan air tanah yang terdiri dari cadangan air tanah bebas adalah 320.000.000 m<sup>3</sup> dan telah dimanfaatkan 96.533,623 m<sup>3</sup>.

## 3. Flora Dan Fauna

Ada beberapa jenis flora yang tumbuh di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kelapa, kapuk, salak pondoh, dan sebagainya. Dikawasan hutan ditemukan jenis kayu dadap, rotan, sawo kecil, kemiri, jati, pinus dan sebagainya.

Terdapat pula beberapa jenis fauna yang hidup, antara lain jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, domba dan unggas. Ada juga hewan yang hidup dikawasan hutan, seperti kera, kucing hutan dan berbagai jenis burung.

#### 4. Bahan Tambang

Bahan tambang yang terdapat diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya termasuk bahan galian golongan C, yang terdiri dari batu kapur, kalsit, kaolin, abu bumi/lempung sirap, gips, tias, batu apug, pasir kuarsa, batu beku andesit, tanah liat, pasir, dan kerikil.

#### D. Nilai-Nilai Budaya

Gudeg merupakan masakan khas Yogyakarta yang sangat terkenal. Selain itu Yoga juga terkenal sebagai kota Revolusi dan kebudayaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap daerah di sekitarnya. Kebudayaan-kebudayaan tersebut adalah :

##### 1. Kesenian

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan jawa banyak menghasilkan berbagai bentuk kesenian yang memberikan ciri kekhasannya, terutama tercermin dalam bidang seni tari, karawitan klasik, wayag dan ketoprak. Beberapa bentuk seni tari diantaranya yaitu Tari Bedoyo, Tari Golek, Tari Serimpi dan sebagainya.

##### 2. Pakaian Adat

Dalam hal berpakaian adat masyarakat Yogyakarta membedakan antara kaum pria dan wanita. Pakaian adat kaum pria terdiri atas tutup kepala, baju jas dengan leher tertutup dan keris yang diselipkan dipinggang. Ia juga mengenakan kain batik yang mempunyai motif yang sama dengan yang dipakai kaum wanita. Sedangkan pakaian wanitanya terdiri atas



kebaya dan kain batik dengan rambut yang disanggul dan diberi hiasan konde.

### 3. Senjata

Senjata tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta adalah keris dan tombak. Senjata-senjata tersebut dikenal dengan sebutan tosan aji, yang mana tosan berarti besi dan aji berarti dihormati karena bertuah, sehingga tosan aji berarti senjata yang dihormati karena bertuah.

### 4. Bangunan

Jenis bangunan tempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dalam empat macam bentuk yang dibedakan berdasarkan bentuk atapnya, yaitu :

- a. Penggape yang mempunyai atap satu sisi.
- b. Kampung yang mempunyai atap dua sisi.
- c. Limasan yang mempunyai atap empat sisi.
- d. Joglo yang mempunyai atap empat sisi seperti limasan, hanya bubungannya lebih tinggi.

## E. Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengikuti skenario nasional, yaitu menuju keseimbangan antara industri dengan pertanian sambil mendorong sektor lain. Semakin berperannya sektor industri dalam menggerakkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru serta pertumbuhan pesat sektor

jasa seperti pariwisata dan transportasi menjanjikan peluang perkembangan serentak sejumlah besar sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi yang ada yaitu :

#### 1. Pertanian

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk dan sekaligus sebagai penampung mayoritas angkatan kerja Didaerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini dengan luas 3.185,80 km<sup>2</sup> atau 318.580 ha mempunyai areal pertanian seluas 253.387,80 ha. Sektor-sektor pertanian yang dilakukan Didaerah Istimewa Yogyakarta meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

#### 2. Industri

Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa macam industri, yaitu :

- a. Industri tekstil pakaian dan kulit
- b. Industri makanan dan minuman
- c. Industri kertas, percetakan dan penerbitan
- d. Industri barang galian bukan logam
- e. Industri kayu dan barang-barang dari kayu
- f. Industri barang logam, mesin dan perlengkapannya
- g. Industri kimia dan barang-barang dari kimia

#### 3. Pertambangan dan Bahan Galian

Komoditi utama bahan pertambangan dan galian adalah abu bumi, pasir kuarsa, kalasit, batu kapur, pasir kerikil dan gips.

#### 4. Perhubungan

Sarana perhubungan utama di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah perhubungan darat dan perhubungan udara. Berdasarkan status pengelolaan, jalan di wilayah ini dapat dibedakan atas jalan negara yaitu sepanjang 90,50 km, jalan propinsi 407,602 km, jalan kabupaten 3.210,54 km, jalan kota 223,06 km serta jalan desa atau lingkungan 6.871 km. Untuk perhubungan udara dilayani melalui Bandar Udara Adi Sucipto yang terletak di Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk darat yaitu kereta api dilayani melalui stasiun Tugu dan stasiun Lempuyangan, kendaraan umum selain kereta api dilayani melalui terminal Giwangan dan terminal bantuan Jombor.

#### 5. Pariwisata

Jumlah objek wisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 85 tempat yang tersebar diseluruh kabupaten dan kota. Objek wisata itu terdiri dari 64 objek wisata budaya dan 19 objek wisata alam, yang diantaranya yaitu Candi Prambanan, Kerato Yogyakarta, Pantai Parangtritis, pusat perbelanjaan Malioboro dan lain-lain.

#### 6. Perdagangan

Sistem pengadaan dan penyaluran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang yang dikategorikan strategis merupakan prioritas utama kebijaksanaan pembangunan sistem perdagangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Prioritas yang utama lainnya adalah mengupayakan sebanyak mungkin barang produksi dalam negeri untuk industri dan

konsumsi lokal, contohnya yaitu beras, gula, tepung terigu, kedelai, sabun, minyak, pupuk dan seluruh komponen bahan bangunan. Untuk perdagangan luar negeri propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 42 buah komoditi perdagangan, serta 34 negara sasaran ekspor. Komoditi-komoditi tersebut diantaranya adalah tekstil, sarung tangan golf, pakaian jadi, kerajinan kulit, lampu pijar, kerajinan perak, vanili dan mebel kayu.

#### **F. Politik**

Dalam bidang politik, Yogyakarta terkenal karena telah melahirkan sejumlah tokoh politik nasional yang memainkan peran sentral dalam keseluruhan rangkaian kehidupan politik di Indonesia dan juga menjadi tempat lahir dan persemaian bagi tumbuhnya organisasi politik dan kemasyarakatan terkemuka, seperti Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi besar di Indonesia.

Ada beberapa bagian dari politik, yaitu :

##### **1. Kebijakan Dasar Politik**

Kebijakan dasar bidang politik yang diterapkan oleh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kebijakan yang mengacu pada serangkaian perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950

sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 1959.

- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
- c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

## 2. Pemerintahan

Perubahan kebijakan di bidang pemerintahan daerah dari keseimbangan antara asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menjadi titik berat desentralisasi pada Kabupaten dan Kota, sedangkan di Propinsi dengan titik berat dekonsentrasi membawa akibat terhadap perubahan struktur organisasi yang mendasar di propinsi. Sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Propinsi dalam menyelenggarakan kewenangan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi hanya sebatas pada ketugasan dan fungsi fasilitas, koordinasi, dan regulasi, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada implementasi restrukturisasi, dan eksistensi perangkat daerah yang ada.

Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di dalam Peraturan Pemerintah tersebut jumlah dan besarnya kelembagaan perangkat daerah telah dibatasi secara limitatif, namun demikian untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan penataan kelembagaan belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

### 3. Organisasi dan Administrasi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, struktur organisasi dan administrasinya adalah :

- a. Di daerah dibentuk DPRD sebagai badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X.

- c. Dalam menjalankan tugasnya dan kewenagannya sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab pada DPRD propinsi.
- d. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga teknis lainnya.
- e. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- f. Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijaksanaan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya.
- g. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

#### **G. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didapat dari beberapa sumber, yaitu:

- 1. Hasil Pajak Daerah
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah
- 2. Hasil Retribusi Daerah
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - c. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
  - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
  - g. Retribusi Izin Trayek
  - h. Retribusi Dispensasi Kelebihan Muatan
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Lainnya Yang Dipisahkan.
- a. Bank Pembangunan Daerah
  - b. PD Aneka Industri dan Jasa ANINDYA
  - c. Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- a. Penjualan Drum Kosong
  - b. Jasa Giro
  - c. Sumbangan Pihak Ketiga
  - d. Angsuran Rumah Dinas
  - e. Pendapatan Lain-lain



## BAB V

### DISKRIPSI, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Diskripsi Data

Dalam suatu penelitian pengaruh menggunakan analisis regresi sederhana, peneliti membutuhkan dua variabel yang akan digunakan sebagai variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah merupakan variabel random kontinyu, yaitu variabel yang nilainya diperoleh melalui proses sampling. Variabel independen adalah merupakan serangkaian nilai yang ditentukan atau diketahui dan bukan random. Variabel independen disebut juga *predictor*, yaitu variabel yang digunakan untuk membuat estimasi atau perkiraan tentang *criterion*, yaitu variabel dependen. Disini sebagai variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah, dan sebagai variabel independen adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

##### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pedapatan Asli Daerah disini berlaku sebagai variabel dependen. Dalam analisis yang dilakukan akan di cari apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari salah satu komponennya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Data yang dapat diperoleh adalah selama kurun waktu enam tahun, yaitu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Data tersebut tersaji dalam tabel I.

**Tabel V. I**

Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1998 s/d 2003

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1998/1999	Rp. 41.875.357.884,30
1999/2000	Rp. 59.315.028.245,42
2000	Rp. 86.260.970.721,27
2001	Rp. 142.323.367.463,21
2002	Rp. 219.923.366.347,71
2003	Rp. 272.129.778.875,53
<b>Total</b>	<b>Rp. 821.827.869.537,44</b>

Sumber: Data Target Dan Realisasi Pendapatan daerah Propinsi DIY

## 2. Pajak Kendaraan Bermotor

Yang berlaku sebagai variabel independen adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam analisis yang dilakukan akan dilihat apakah Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah tersebut. Data yang dapat diperoleh adalah selama kurun waktu enam tahun, yaitu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Data tersebut tersaji dalam tabel 2.

**Tabel V. 2**

Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1998 s/d 2003

Tahun	Jumlah
1998/1999	Rp. 23.059.582.945,00
1999/2000	Rp. 29.665.665.070,00
2000	Rp. 34.944.736.735,00
2001	Rp. 56.045.202.910,00
2002	Rp. 66.953.503.135,00
2003	Rp. 87.824.820.800,00
<b>Total</b>	<b>Rp. 298.493.511.595,00</b>

Sumber: Data Target Dan Realisasi Pendapatan daerah Propinsi DIY

## B. Analisis Data

Analisis data yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ada beberapa output yang dihasilkan dalam analisis ini, dimana output tersebut digunakan sebagai alat baca untuk mendapatkan kesimpulan. Output-output tersebut antara lain :

### 1. Descriptive Statistics

**Tabel V. 3**

*Descriptive Statistics*

Keterangan	Mean	Std. Deviation	N
Pendapatan Asli Daerah	136971311589.5733	92544882726.9049	6
Pajak Kendaraan Bermotor	49748918599.1667	24980939791.0719	6

## 2. Correlation

**Tabel V. 4**

*Correlations*

Keterangan	Variabel	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Kendaraan Bermotor
Pearson Correlation	Pendapatan Asli Daerah	1.000	.991
	Pajak Kendaraan Bermotor	.991	1.000
Sig. (1-tailed)	Pendapatan Asli Daerah	.	.000
	Pajak Kendaraan Bermotor	.000	.
N	Pendapatan Asli Daerah	6	6
	Pajak Kendaraan Bermotor	6	6

## 3. Model Summary

**Tabel V. 5**

*Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991	.982	.978	13834487139.0491

a Predictors: (Constant), Pajak Kendaraan Bermotor

b Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah



#### 4. Coefficients

**Tabel V. 6**  
Coefficients

	Keterangan	Unstandardized Coefficients	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
Mo del		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-45674648640.080	13553994147.274		-3.370	.028
	Pajak Kendaraan Bermotor	3.671	.248	.991	14.824	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

### C. Pembahasan

#### 1. Descriptive Statistics

Diskripsi dari kedua variabel yang diregresikan ditampilkan disini. Dalam tabel 3 dapat kita lihat isi diskripsi tersebut, yaitu : Rata-rata (mean) dari Pendapatan Asli Daerah periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 adalah 136.971.311.589,5733, Rata-rata dari Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 adalah 49.748.918.599,1667. Standar deviasi dari Pendapatan Asli Daerah adalah 92.544.882.726,9049, Standar deviasi dari Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor adalah 24.980.939.791,0719. Jumlah sampel dari Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor yang diuji masing-masing adalah 6.

## 2. *Correlation*

Sebelum peneliti melakukan uji regresi maka perlu melihat dahulu korelasinya. Output korelasi yang dapat kita lihat di tabel 4, koefisien korelasi dari Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor adalah 0,991, dengan tingkat signifikansi 0,000. Koefisien korelasi semakin mendekati angka satu maka menunjukkan adanya hubungan yang semakin kuat antara X (Pajak Kendaraan Bermotor) dan Y (Pendapatan Asli Daerah). Tanda positif dalam koefisien korelasi menunjukkan bahwa kedua variabel berubah dalam arah yang sama, artinya apabila Pajak Kendaraan Bermotor bertambah maka Pendapatan Asli Daerah juga bertambah.

## 3. *Model Summary*

Pada bagian ini ditampilkan nilai  $R$ ,  $R^2$ , *Adjusted*  $R^2$  dan Setandar Error. Dimana nilai koefisien determinasi  $R^2$  (*R Square*) sebesar 0,982.  $R^2$  ini merupakan indek determinasi, yaitu prosentase yang menunjukkan besarnya pengaruh X (Pajak Kendaraan Bermotor) terhadap Y (Pendapatan Asli Daerah).  $R^2$  sebesar 0,982 menunjukkan pengertian bahwa sebesar 98,2% sumbangan pengaruh X (pajak Kendaraan Bermotor) terhadap Y (Pendapatan Asli Daerah), sedang sisanya sebesar 1,8% dipengaruhi oleh komponen Pendapatan Asli Daerah yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan komponen yang memberikan sumbangan terbesar pada Pendapatan Asli Daerah.

## 4. *Coefficients*

Pada bagian *output koefisien* dikemukakan nilai koefisien a dan b, t-hitung serta tingkat signifikansi. Dari tabel 6 (*koefisien*) didapat persamaan perhitungan sebagai berikut :

$$Y = -45.674.648.640,08 + 3,671X$$

Dimana :

X : Pajak Kendaraan Bermotor

Y : Pendapatan Asli Daerah

Angka  $-45.674.648.640,08$  merupakan nilai konstanta (a) yang menunjukkan bahwa jika tidak ada pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor maka Pendapatan Asli Daerah akan berkurang sebesar Rp45.674.648.640,08. Sedangkan angka  $3,671 X$  merupakan koefisien regresi, yang menunjukkan bahwa setiap adanya penambahan sebesar Rp1,00 untuk Pajak Kendaraan Bermotor, maka akan ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3,671.

Nilai yang digunakan dalam pengujian pengaruh adalah nilai signifikansi, dimana nilai signifikansi tersebut adalah sebesar 0,000, mengingat signifikansi sebesar 0,000 adalah kurang dari nilai  $\alpha$  sebesar 0,050, maka dengan demikian,  $H_0$  : ditolak, dan dengan demikian dapat diartikan ada pengaruh yang signifikan dari Pajak Kendaraan Bermotor periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa  $H_0$  : ditolak, dan dapat diartikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari Pajak Kendaraan Bermotor periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 menyebabkan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Ada beberapa keterbatasan yang penulis temui dalam melaksanakan penelitian ini, antara lain :

##### **1. Faktor Data**

Penulis merencanakan menganalisis data selama sepuluh tahun, akan tetapi pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya dapat menyediakan data selama enam tahun.

##### **2. Faktor Perubahan Periode Tahun Anggaran**

Sebelum tahun 2000 Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan Periode Anggaran April sampai dengan Maret, akan tetapi mulai tahun 2000 kebijakan periode anggaran tersebut diubah menjadi



Januari sampai dengan Desember. Karena perubahan kebijakan tersebut maka tahun anggaran 2000 hanya terdiri dari sembilan bulan, yaitu bulan April sampai dengan Desember.

### **C. Saran**

Melihat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

#### **1. Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah supaya selalu mengevaluasi peraturan perpajakan daerah, khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan kondisi dimana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **2. Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya supaya melakukan penelitian dalam periode waktu yang lebih lama, karena dengan periode waktu yang lebih lama maka akan memberikan hasil penelitian yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhusin, Syahri. (2003). *Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS.10 For Windows*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Awat, Napa J. (1995). *Metode Statistik dan Ekonometri*. Yogyakarta : Liberty.
- Djarwanto Ps. (2001). *Mengenal Beberapa Uji Statistik Dalam Penelitian*. Yogyakarta : Liberty.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Edisi Refisi. Yogyakarta : Andi.
- Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Sanata Dharma* (2003). Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (2004). Yogyakarta : Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-undang Otonomi Daerah*. Jakarta : Restu Agung.
- Resmi, Siti. (2002) *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Samudra, Azhari A. (1995). *Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Tjahjono Achmad, Muhammad Fakhri Husein. (1999). *Perpajakan*. Edisi 2. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. (1999). *Perpajakan Indoneia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Zain, Muhamad. (2004). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

*Lampiran 1***REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROPINSI DIY  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
April	Rp. 1.723.158.890,00
Mei	Rp. 1.720.965.430,00
Juni	Rp. 1.813.717.485,00
Juli	Rp. 1.916.026200,00
Agustus	Rp. 2.011.843.035,00
September	Rp. 2.084.971.675,00
Oktober	Rp. 2.086.032.430,00
November	Rp. 1.939.761.760,00
Desember	Rp. 2.084.337.480,00
Januari	Rp. 1.692.124.260,00
Februari	Rp. 1.837.696.635,00
Maret	Rp. 2.148.947.665,00
<b>Total</b>	<b>Rp. 23.059582.945,00</b>

Sumber: Data Target Dan Realisasi Pendapatan daerah Propinsi DIY

*Lampiran 2***REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROPINSI DIY  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
April	Rp. 1.884.509.390,00
Mei	Rp. 2.126.913.465,00
Juni	Rp. 2.125.663.055,00
Juli	Rp. 2.307.122.590,00
Agustus	Rp. 2.408.911.230,00
September	Rp. 2.487.547.770,00
Oktober	Rp. 2.390.349.605,00
November	Rp. 2.507.447.425,00
Desember	Rp. 2.505.423.100,00
Januari	Rp. 2.144.880.300,00
Februari	Rp. 2.913.258.955,00
Maret	Rp. 3.737.626.865,00
<b>Total</b>	<b>Rp. 29.665.665.070,00</b>

Sumber: Data Target Dan Realisasi Pendapatan daerah Propinsi DIY

*Lampiran 3***REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROPINSI DIY  
TAHUN ANGGARAN 2000**

<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
April	Rp. 3.308.380.495,00
Mei	Rp. 3.853.770.385,00
Juni	Rp. 3.587.621.685,00
Juli	Rp. 3.808.119.130,00
Agustus	Rp. 4.107.146.455,00
September	Rp. 3.830.647.875,00
Oktober	Rp. 4.311.871.175,00
November	Rp. 4.174.517.575,00
Desember	Rp. 3.962.661.960,00
<b>Total</b>	<b>Rp. 34.944.736.735,00</b>

Sumber: Data Target Dan Realisasi Pendapatan daerah Propinsi DIY

*Lampiran 4***REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROPINSI DIY  
TAHUN ANGGARAN 2001**

<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Januari	Rp. 3.846.949.890,00
Februari	Rp. 3.829.188.150,00
Maret	Rp. 4.265.597.605,00
April	Rp. 4.602.510.325,00
Mei	Rp. 4.691.506.625,00
Juni	Rp. 4.336.168.875,00
Juli	Rp. 5.002.715.550,00
Agustus	Rp. 5.024.004.050,00
September	Rp. 4.586.408.675,00
Oktober	Rp. 5.629.768.975,00
November	Rp. 5.260.773.360,00
Desember	Rp. 4.969.610.830,00
<b>Total</b>	<b>Rp. 56.045.202.910,00</b>

Sumber: Data Target Dan Realisasi Pendapatan daerah Propinsi DIY

*Lampiran 5***REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROPINSI DIY  
TAHUN ANGGARAN 2002**

<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Januari	Rp. 4.869.945.200,00
Februari	Rp. 4.711.167.550,00
Maret	Rp. 4.893.522.230,00
April	Rp. 5.752.706.540,00
Mei	Rp. 5.590.497.975,00
Juni	Rp. 4.984.617.625,00
Juli	Rp. 6.114.191.065,00
Agustus	Rp. 5.821.514.350,00
September	Rp. 6.225.060.900,00
Oktober	Rp. 6.324.672.700,00
November	Rp. 6.068.084.250,00
Desember	Rp. 5.597.522.750,00
<b>Total</b>	<b>Rp. 66.953.503.135,00</b>

Sumber: Data Target Dan Realisasi Pendapatan daerah Propinsi DIY

*Lampiran 6***REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROPINSI DIY  
TAHUN ANGGARAN 2003**

<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Januari	Rp. 6.230.430.300,00
Februari	Rp. 6.049.565.700,00
Maret	Rp. 6.890.797.100,00
April	Rp. 6.592.182.450,00
Mei	Rp. 6.875.571.800,00
Juni	Rp. 7.432.771.900,00
Juli	Rp. 7.861.273.050,00
Agustus	Rp. 7.450.040.850,00
September	Rp. 8.181.443.350,00
Oktober	Rp. 8.546.630.200,00
November	Rp. 6.674.584.650,00
Desember	RP. 9.039.529.450,00
<b>Total</b>	<b>Rp. 87.824.820.800,00</b>

Sumber: Data Target Dan Realisasi Pendapatan daerah Propinsi DIY



*Lampiran 7***REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI DIY  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
April	Rp. 4.292.694.247,50
Mei	Rp. 2.935.533.874,75
Juni	Rp. 3.014.737.543,75
Juli	Rp. 3.237.085.200,75
Agustus	Rp. 3.030.715.964,50
September	Rp. 3.284.660.376,75
Oktober	Rp. 3.197.818.090,27
November	Rp. 3.070.272.081,90
Desember	Rp. 4.347.082.321,75
Januari	Rp. 2.661.658.564,35
Februari	Rp. 4.277.730.474,04
Maret	Rp. 4.526.263.856,83
<b>Total</b>	<b>Rp. 41.875.357.884,30</b>

Sumber: Data Target Dan Realisasi Pendapatan daerah Propinsi DIY

*Lampiran 8*

**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI DIY  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
April	Rp. 4.184.426.785,00
Mei	Rp. 3.272.168.220,00
Juni	Rp. 3.326.020.629,86
Juli	Rp. 3.471.546.135,00
Agustus	Rp. 4.113.436.353,00
September	Rp. 4.697.573.038,74
Oktober	Rp. 4.333.811.304,00
November	Rp. 7.925.047.420,06
Desember	Rp. 4.741.706.992,00
Januari	Rp. 4.009.995.345,50
Februari	Rp. 6.039.771.641,67
Maret	Rp. 9.199.524.381,09
<b>Total</b>	<b>Rp. 59.315.028.245,42</b>

Sumber: Data Target Dan Realisasi Pendapatan daerah Propinsi DIY

*Lampiran 9***REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI DIY  
TAHUN ANGGARAN 2000**

<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
April	Rp. 8.821.637.514,50
Mei	Rp. 7.762.447.790,00
Juni	Rp. 10.895.225.100,66
Juli	Rp. 8.537.936.628,35
Agustus	Rp. 9.784.954.219,00
September	Rp. 9.123.566.081,00
Oktober	Rp. 10.117.878.849,17
November	Rp. 10.480.494.343,50
Desember	Rp. 10.736.830.195,09
<b>Total</b>	<b>Rp. 86.260.970.721,27</b>

Sumber: Data Target Dan Realisasi Pendapatan daerah Propinsi DIY

*Lampiran 10***REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI DIY  
TAHUN ANGGARAN 2001**

<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Januari	Rp. 8.916.617.767,00
Februari	Rp. 9.288.324.712,38
Maret	Rp. 9.551.236.971,00
April	Rp. 10.606.889.592,00
Mei	Rp. 14.556.267.449,99
Juni	Rp. 10.805.046.425,00
Juli	Rp. 12.479.305.092,00
Agustus	Rp. 11.855.252.049,00
September	Rp. 11.382.266.802,00
Oktober	Rp. 16.165.288.564,00
November	Rp. 14.298.803.328,14
Desember	Rp. 12.419.068.710,70
<b>Total</b>	<b>Rp. 142.323.367.463,21</b>

Sumber: Data Target Dan Realisasi Pendapatan daerah Propinsi DIY

*Lampiran 11***REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI DIY  
TAHUN ANGGARAN 2002**

<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Januari	Rp. 17.398.784.753,22
Februari	Rp. 10.985.124.180,00
Maret	Rp. 11.927.998.150,00
April	Rp. 14.366.318.673,00
Mei	Rp. 20.718.699.794,33
Juni	Rp. 12.588.561.269,00
Juli	Rp. 24.252.338.363,06
Agustus	Rp. 21.068.980.356,01
September	Rp. 19.010.577.923,00
Oktober	Rp. 19.011.847.732,00
November	Rp. 19.602.067.848,80
Desember	Rp. 29.002.067.305,29
<b>Total</b>	<b>Rp. 219.923.366.347,71</b>

Sumber: Data Target Dan Realisasi Pendapatan daerah Propinsi DIY

*Lampiran 12***REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI DIY  
TAHUN ANGGARAN 2003**

<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Januari	Rp. 25.621.544.271,88
Februari	Rp. 17.515.035.242,00
Maret	Rp. 22.216.464.981,03
April	Rp. 26.933.179.678,93
Mei	Rp. 19.609.979.722,00
Juni	Rp. 18.847.770.180,00
Juli	Rp. 25.380.114.086,00
Agustus	Rp. 22.181.861.665,00
September	Rp. 23.872.153.908,00
Oktober	Rp. 24.871.221.546,95
November	Rp. 18.441.376.386,28
Desember	RP. 26.639.077.207,46
<b>Total</b>	<b>Rp. 272.129.778.875,53</b>

Sumber: Data Target Dan Realisasi Pendapatan daerah Propinsi DIY

Lampiran 13**Regression****Descriptive Statistics**

Keterangan	Mean	Std. Deviation	N
Pendapatan Asli Daerah	136971311589.5733	92544882726.9049	6
Pajak Kendaraan Bermotor	49748918599.1667	24980939791.0719	6

**Correlations**

Keterangan	Keterangan	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Kendaraan Bermotor
Pearson Correlation	Pendapatan Asli Daerah	1.000	.991
	Pajak Kendaraan Bermotor	.991	1.000
Sig. (1-tailed)	Pendapatan Asli Daerah	.	.000
	Pajak Kendaraan Bermotor	.000	.
N	Pendapatan Asli Daerah	6	6
	Pajak Kendaraan Bermotor	6	6

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991	.982	.978	13834487139.0491

a Predictors: (Constant), Pajak Kendaraan Bermotor

b Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

**Coefficients**

	Keterangan	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-45674648640.080	13553994147.274		-3.370	.028
	Pajak Kendaraan Bermotor	3.671	.248	.991	14.824	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI DIY**  
 SESUAI PERATURAN DAERAH PROPINSI DIY NOMOR : 2 TAHUN 2004, TANGGAL 5 FEBRUARI 2004



Sumber: Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 07.0 / 9584

Membaca Surat : Dekan FE - USD Yk No : 31/Kaprodi Akt/121/XII/2004  
Tanggal : 16 desember 2004 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

Nama : HANDARU PURNANDIKA No. Mhs./NIM : 002114136  
Alamat Instansi : Jl. Mrican, Yogyakarta  
Judul : PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPAT ASLI DAERAH

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 16 Desember 2004 s/d 16 Maret 2005

Dengan Ketentuan :

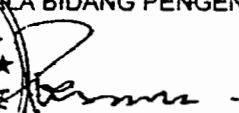
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

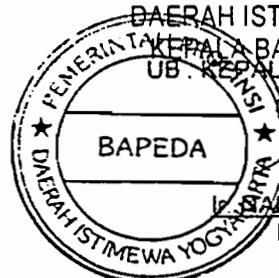
Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

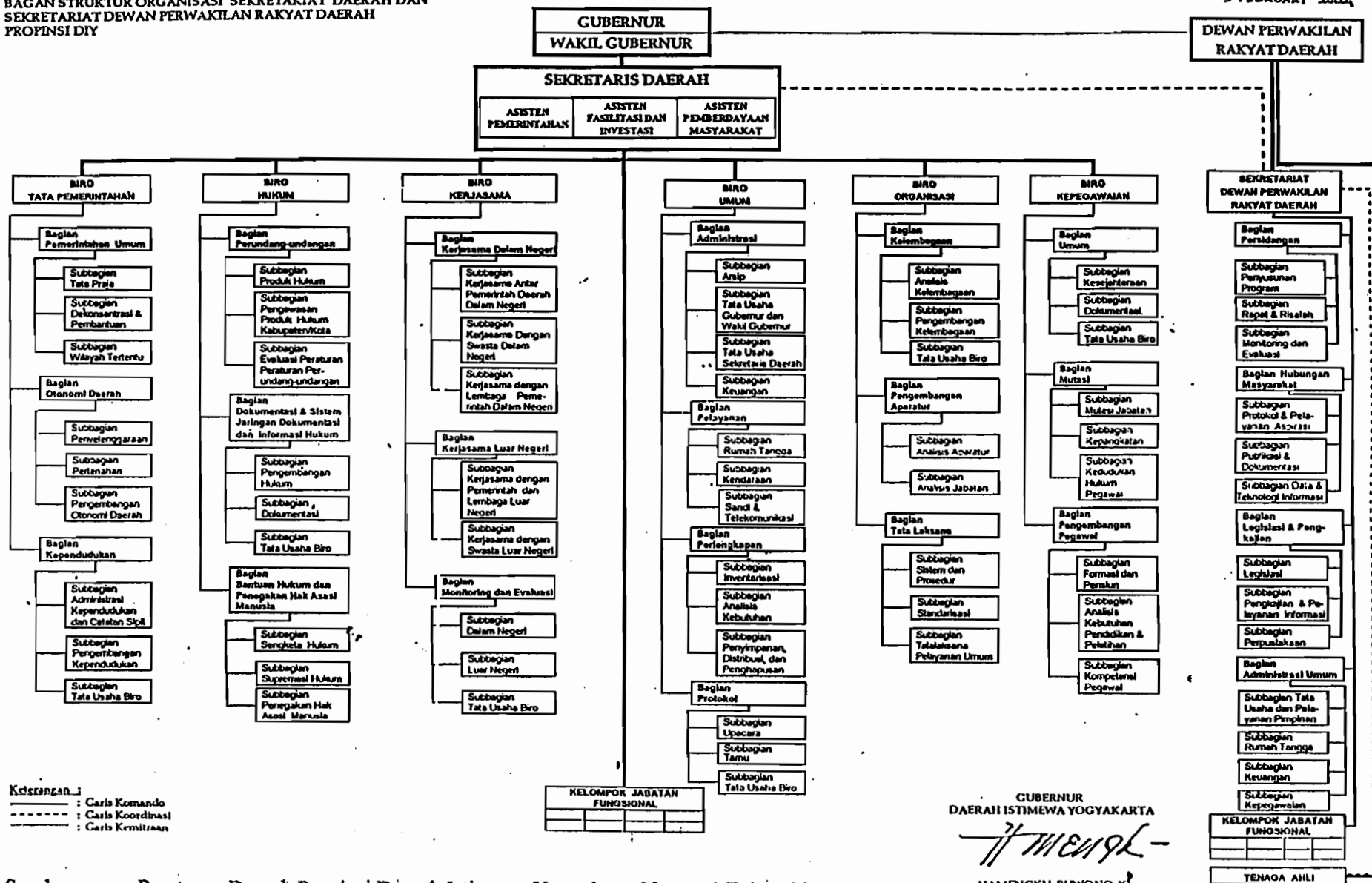
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ( Sebagai Laporan )
2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Badan Pengelola Keuangan Daerah DIY;
4. Dekan FE - USD Yk;
5. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 16 Desember 2004

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY  
UB. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN  
  
BAMBANG SUWANDI MMA  
NIP. 490 022 448



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI DIY



## **DAFTAR PERTANYAAN**

### **A. Sejarah Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta**

1. Kapan DIY secara Resmi menjadi bagian dari NKRI?
2. Bagaimanakah sejarah terbentuknya DIY?

### **B. Geografi**

1. Bagaimanakah letak DIY secara geografis?
2. Dengan daerah mana sajakah DIY berbatasan?
3. Berapakah luas DIY?
4. Di bagi menjadi berapa kabupaten dan kota DIY?

### **C. Kekayaan Alam**

Kekayaan alam apa sajakah yang dimiliki DIY?

### **D. Nilai-Nilai Budaya**

Sebagai salah satu kota budaya, budaya apa sajakah yang dimiliki oleh DIY?

### **E. Ekonomi**

1. Seberapa luaskah area pertanian di DIY dan sektor-sektor pertanian apa sajakah yang ada?
2. Di dalam bidang industri, industri apasajakah yang berkembang di DIY?
3. Komoditi apa sajakah yang ada di DIY dalam bidang pertambangan dan bahan galian?
4. Sebagai salah salah satu sarana dalam kelancaran perekonomian, sarana perhubungan apa sajakah yang dimiliki DIY?

5. Sebagai salah satu kota wisata, objek wisata apa sajakah yang dimiliki DIY?
6. Kebijakan apa yang diambil pemerintah DIY dalam menjalankan sektor perdagangan?

**F. Politik**

1. Kebijakan dasar Politik apa yang diambil pemerintah DIY?
2. Dalam bidang pemerintahan, mengacu pada kebijakan dasar politik, kebijakan apa yang ditetapkan pemerintah DIY?
3. Bagaimanakah struktur organisasi dan administrasi yang ada di DIY?

